

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Adapun beberapa kesimpulan lainnya yang dapat peneliti rangkum dari beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Adapun perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu Pertama Pendidikan, dalam program pendidikan mencakup anak sekolah SD, SMP dan SMA. Kedua Kesehatan, dalam program kesehatan termasuk ibu hamil/nifas, bayi, balita, anak prasekolah. Ketiga Kesejahteraan Sosial, dalam program ini yaitu disabilitas dan lansia.
2. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ua terdata dalam penerima Program Keluarga Harapan yaitu pada tahun 2021. Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan Non-tunai bersyarat kepada penerimanya, dan bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dengan ketentuan, memiliki ibu hamil dan nifas/menyusui, anak balita, anak usia sekolah (SD, SMP dan SMA).

Adapun tahapan Program Keluarga Harapan:

- a. Tahap pertemuan awal
  - b. Memasukan data ke Sistem Informasi Manajeme
  - c. Pembayaran
  - d. Vefikasi komitmen
3. Adapun faktor pendorong dan penghambat program Keluarga Harapan yang di laksanakan di desa Ua yaitu meski belum terlaksanakan dengan sempurna karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang jalannya program, terlebih lagi keluarga-keluarga miskin ada yang belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan. Walaupun demikian, masyarakat mengakui bahwa program ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat.

## **6.2 Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat peserta Program Keluarga Harapan agar dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya, terutama dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang berbentuk bantuan Non-tunai bersyarat dan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Diharapkan juga kepada masyarakat agar dalam menyampaikan keluhannya kepada pemerintah lebih baik menggunakan perwakilan dari mereka agar terhindar dari terjadinya perdebatan. Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan agar tidak saling menyalahkan dengan aparatur kampung dan pendamping PKH.
3. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat lebih teliti dalam mengambil data yang berkenaan dengan masyarakat desa. Diharapkan juga kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) agar lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, baik dalam menerima pengaduan dan juga dalam membantu mereka menyampaikan suara mereka kepada pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2007. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Barrett,S 2004. Time fore a Revival Personal Refection on 20 Years of Implementation Studies. Public Administration 82: 249-262.
- Cut Razi Mirsandi (2019) Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya. Universitas Islam Negri AR-RANIRY DarussalamBanda Aceh.
- Donofan, G. (2020). Data penerima Bansos di Kabupaten Nagekeo. Pos-Kupang.com
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congresional Quarterly Press.
- Grindle, Marille S (ed.). 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University Press.
- Habibullah.2017. “Perlindungan Sosial Komperhensif Di Indonesia” Sosio Informa (Vol 3)
- Helfi Eka Putri (2020) Problematika Implementasi Program Keluarga Harapan(PKH) di Kecamatan Tanggungnung.Universitas Muhammadiyah Malang.
- [hhttps://www.kemsos.go.id/unduh/UU-KESOS-No11-2009.pdf](https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-KESOS-No11-2009.pdf).
- Husein, Umar. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
- Kementrian Sosial, “*Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*”. Diakses pada tanggal 22 juni 2016

Lester, James P. dan Stewart Jr., Joseph. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: wadsworth.

Mazmanian, Daniel H, Paul A Sabatier. 1983. *Implementation and Policy*, New York: Harper Collins.

Nurdiana (2017) *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa*. UIN Alauddin Makassar.

Nurfahira Syamsir (2014) *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Program Studi Administrasi Negara Universitas Hasanudin

Permensos No.1 Tahun 2018. 13.04.2021. Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan. ([pkh.kemensos.go.id](http://pkh.kemensos.go.id))

Purwanto Agus Slamet. Sumartono. Makmur, M. 2013. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Memutus Rantai Kemiskinan Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 16(2): 80-94.

Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Yang Responsif*. Bandung : Hakim Publising.

Singarimbun, Masri dan sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.

Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung, Alfabeta.

Van Meter, Donald. Dan Van Horn, Carl. 1975. *The polici Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration and Society*6(4): 445-488.